



Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan (2011-2022)

Ine Febrianti Siregar^{1*}, Rifka Fauziah Batubara², Ruth Septaria Hutapea³, Sinta Rahmawati⁴

^{1,2,3,4}Program Pendidikan Ekonomi, Fakultas Penulis Korespondensi: Ine Febrianti Siregar
Ekonomi, Universitas Negeri Medan e-mail: siregarinefebriati@gmail.com

Email: siregarinefebriati@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 25 Agustus 2023

Diterima: 30 Sept. 2023

Tersedia Online: 30 Sept 2023

Kata kunci :

Pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran Daerah

ABSTRAK

Studi yang dilakukan bertujuan mengevaluasi dampak dari pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 12 tahun, yakni dari tahun 2011 hingga 2022. Pendekatan yang diterapkan studi ini memakai teknik analisis regresi linier berganda melalui memanfaatkan data deret waktu yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini menghasilkan dimana keduanya, baik pendapatan daerah maupun belanja daerah, secara bersamaan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam Uji T (Sebagian), probabilitas pendapatan daerah dengan nilai $0,000 < 5\%$ atau $0,05$, sehingga H_0 tidak disetujui dan H_a disetujui. Begitu juga dengan probabilitas belanja daerah sebesar $0,0206 < 5\%$ atau $0,05$, sehingga mampu mengindikasikan dimana H_0 disetujui dan H_a disetujui (yang berada di tingkat signifikansi 5% atau $0,05$). Uji F (Serentak) menghasilkan skor Prob (F-statistik) dengan nilai $0,0000003 < 5\%$ atau $0,05$, sehingga H_0 tidak disetujui dan H_a disetujui. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bermutu di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Artikel History:

Received: 25 August 2023

Accepted: 30 Sept 2023

Available Online: 30 Sept 2023

Keywords:

Income, Economic Growth, Regional Expenditure

The study aimed at evaluating the impact of regional income and regional expenditure on economic growth in South Tapanuli Regency over a 12 year period, namely from 2011 to 2022. The approach applied in this study uses multiple linear regression analysis techniques using time series data collected by Central Statistics Agency (BPS). This study shows that both regional income and regional expenditure simultaneously have a large impact on economic growth. In the T Test (Partial), the probability of regional income is $0.000 < 5\%$ or 0.05 , so H_0 is not approved and H_a is approved. Likewise, the probability of regional spending is $0.0206 < 5\%$ or 0.05 , so it can indicate where H_0 is approved and H_a is approved (which is at the 5% or 0.05 significance level). The F (Simultaneous) test produces a Prob (F-statistic) value of $0.0000003 < 5\%$ or 0.05 , so H_0 is not approved and H_a is approved. These findings can be a basis for developing policies and strategies for sustainable and quality economic development in South Tapanuli Regency.

1. PENDAHULUAN

Masuk ke dalam Era Society 5.0, pemanfaatan teknologi mulai memperhatikan dimensi humaniora dalam menciptakan berbagai perkakas untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada saat ini. Fokus utama Era Society 5.0 adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang merambah seluruh lapisan masyarakat. (Wasitarini, 2019:28). Peningkatan kapasitas pembuatan di perekonomian suatu negara, yang dalam peningkatan pendapatan negara, dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Hal ini merujuk pada situasi di mana perekonomian suatu negara mengalami peningkatan jangka panjang. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diindikasikan oleh adanya pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis makro, peningkatan ekonomi negara dapat dilihat dengan menilai perimbangan pendapatan nasional riil yang berhasil dicapai oleh negara tersebut.

Faktanya, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang terus berlanjut tergolong rendah ini didukung oleh pola konsumsi publik. (Mudrajad Kuncoro: 2004). Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi yang signifikan tergantung pada konsumsi dianggap tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sebaliknya, peningkatan ekonomi yang stabil adalah peningkatan yang didorong oleh investasi. Peningkatan yang disokong oleh investasi dianggap mampu meningkatkan tingkat produktivitas, jadi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Proses pertumbuhan ekonomi sendiri menggambarkan situasi ekonomi suatu negara yang bergerak menuju perbaikan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari tujuannya yang sangat penting bagi pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah daerah didorong oleh pertumbuhan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi sehubungan dengan cara efektif mengawasi sumber daya yang tersedia dan membangun hubungan kerja dengan masyarakat. Hal ini bertujuan dalam menghasilkan peluang pekerjaan baru yang memungkinkan memberikan dampak positif pada perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan daerah sebaiknya didasarkan pada kekuatan fisik, sosial, dan budaya lokal. (Siregar et.al,2021:46).

Guna mencapai kemakmuran masyarakat melalui optimalisasi potensi dan kekuatan ekonomi di suatu daerah, dibentuk suatu instrumen kebijakan yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan perencanaan tahunan yang dibuat, didiskusikan dan disetujui oleh pemerintah daerah secara kolektif. Anggaran daerah

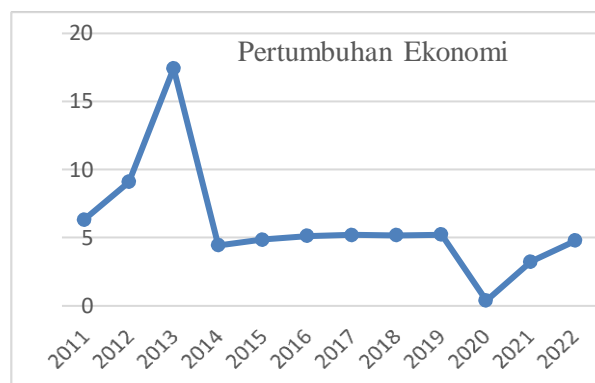
menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan berbagai layanan publik, dan karena itu, pemerintah berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjadi indikator keberhasilan dalam upaya pembangunan ekonomi yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat.

Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi peningkatan ekonomi melibatkan pendapatan dan belanja daerah. Didasarkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merujuk pada penghasilan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui pemungutan sama dengan ketentuan peraturan daerah dan perundang-undangan yang sah. Komponen utama PAD melibatkan pajak daerah dan retribusi lokal. Pajak daerah ialah pembayaran wajib yang harus dilaksanakan setiap individu kepada badan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan UU tanpa kompensasi langsung, dan diperuntukkan

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, sama dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pengeluaran daerah merupakan alokasi dana yang perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, di mana pengeluaran daerah mampu menjadi tolok ukur implementasi kewenangan daerah. Menurut (Saragih, 2013), dana yang dikeluarkan seharusnya digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Darwanto, 2017) berpendapat bahwa persetujuan oleh pemerintah seharusnya difokuskan pada kegiatan program layanan public

Pendanaan lokal mencakup segala bentuk transaksi keuangan terkait penerimaan yang diperlukan untuk dikembalikan dan biaya yang akan dibayar kembali. Hal ini berlaku baik untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan yang akan datang. Pendanaan regional digunakan untuk mengatasi kekurangan atau memanfaatkan kelebihan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan regional termasuk persetujuan dana dan pengeluaran dana. Diperlukan penetapan pembiayaan daerah untuk mengatasi defisit anggaran yang muncul dari ketidakseimbangan antara pendapatan dan rencana pengeluaran daerah. Defisit anggaran ini diharapkan dapat diatasi melalui pembiayaan neto, yang merujuk pada perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Fokus penelitian ini mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan statistik BPS dari tahun 2011 hingga 2022, perkembangan ekonomi di Tapanuli Selatan dapat diamati sebagai berikut:



Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan pola fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, tercatat pertumbuhan sebesar 6,33%, yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2012 menjadi 9,09%. Puncak kenaikan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2013 dengan angka mencapai 17,43%. Namun, pada periode 2014-2015, terjadi penurunan sebesar 4,44% dan 4,86%. Selanjutnya, pada tahun 2016-2017, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat mencapai 5,12% dan 5,21%, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 sebesar 5,19%. Tahun 2019 mencatatkan kenaikan sebesar 5,23%, tetapi pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis sebesar 0,39%. Pada periode 2021-2022, terjadi peningkatan kembali sebesar 3,24% dan 4,78%. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2011 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang kurang lebih stabil setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2018 dan 2020, terdapat peningkatan berturut-turut sebesar 1.368913574, 1.470737329, dan 1.303242398 untuk pendapatan daerah. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar 1.315263549, 1.463791932, dan 1.350731462 pada periode yang sama. Namun, pada tahun 2021-2022, terdapat fluktuasi pendapatan daerah, yakni sebesar 1.005608534 dan 1.558655321. Mengacu pada konteks permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya,

penulis merasa tertarik untuk menyelidiki suatu penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan Tahun 2011-2022.

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:43), merumuskan masalah menjadi dasar pembentukan hipotesis, yang seharusnya mencakup implikasi data untuk menyelesaikan permasalahan. Rumusan masalah harus bersifat jelas, padat, dan umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Dalam konteks penelitian ini, rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Apakah ada dampak signifikan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan? (2) Apakah ada pengaruh signifikan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan? Kabupaten Tapanuli Selatan ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (EP) dapat digambarkan melalui kenaikan produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (GNP), meskipun peningkatan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat pertumbuhan jumlah penduduk akan terjadi perubahan laju pertumbuhan penduduk struktur ekonomi atau tidak. (Arsyad, 1999) seperti yang dijelaskan dalam penelitian tersebut. (Apriana & Suryanto, 2010).

Proses perkembangan keadaan perekonomian suatu negara berkelanjutan menuju tingkat tinggi dalam jangka waktu tertentu dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi (Ernita, 2013). Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi penanda keberhasilan pembangunan suatu negara. Aspek jangka panjang dari ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, karena menjadi tolok ukur utama prestasi pembangunan yang mampu dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat. (Arini & Kusuma, 2019).

Proses peningkatan kondisi ekonomi suatu wilayah dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Reduksi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat jika disertai dengan pengurangan disparitas atau ketidaksetaraan pendapatan. Keterlibatan penduduk miskin dalam proses pertumbuhan dapat mempercepat upaya mengurangi kemiskinan. Menurut model pertumbuhan Rostow, konsepnya adalah meningkatkan potensi pembangunan terlebih dahulu sebelum melakukan distribusi. (Jurnal & Unud, 2015).

Todaro (2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara mampu dijelaskan melalui tiga faktor utama. Pertama, akumulasi modal mencakup investasi baru dalam bentuk apapun yang disalurkan ke tanah, peralatan fisik, modal manusia, dan kemajuan teknologi. Kedua, peningkatan penduduk dari tahun ke tahun akan meningkatkan jumlah akumulasi modal. (Apriana & Suryanto, 2010).

Suatu ekonomi dianggap mampu bertumbuh atau berkembang jika taraf kegiatan ekonominya mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Secara sederhana, perkembangan terjadi ketika jumlah barang dan jasa yang diperoleh dari ekonomi tersebut mengalami peningkatan dalam tahun-tahun berikutnya. Untuk menilai apakah ekonomi mengalami perkembangan atau peningkatan yang terjadi dalam kegiatan

ekonomi satu tahun ke tahun berikutnya harus diidentifikasi. Agar tujuan ini tercapai, pengaruh fluktuasi harga relatif terhadap nilai pendapatan nasional pada tahun-tahun yang berbeda harus dihilangkan dengan menghitung pendapatan nasional dengan dasar harga yang tidak berubah. (Jurnal & Unud, 2015).

Pendapatan Daerah

Didasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang didapatkan dari suatu daerah yang dikumpulkan melalui ketentuan yang sama dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan perpu. Unsur kunci dari PAD melibatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merujuk pada kewajiban pemberian yang harus disetor ke daerah oleh individu atau badan secara obligatoris sesuai dengan ketentuan hukum, tidak menerima imbalan langsung dan dimanfaatkan dalam mencukupi kebutuhan daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sebaik baiknya (UU Nomor 28 Tahun 2009). (Jurnal & Unud, 2015).

Menurut studi yang telah dilaksanakan Koto (2016), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diindikasikan dapat memajukan perkembangan ekonomi di tingkat daerah. Kenaikan PAD diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah, mengungguli capaian pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Terdapat potensi peningkatan PAD bagi daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, sebagaimana disampaikan oleh Saragih (2003). Hal lainnya yaitu terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki dampak positif pada aktivitas bagian bagian yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi, termasuk sektor industri, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diakui sebagai entitas yang signifikan memengaruhi kenaikan ekonomi daerah.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan dorongan positif kepada

kenaikan ekonomi di tingkat daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi pemicu, tetapi juga penggerak untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lebih lanjut, peningkatan PAD dapat secara efektif memaksimalkan dan memperkembangkan kegiatan di sektor-sektor yang berhubungan melalui peningkatan ekonomi, termasuk sektor industri, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya. Prinsip ini ditegaskan oleh Ardiani dalam Wandira (2013), melalui hasil studinya dimana apabila Pendapatan Asli Daerah suatu wilayah tinggi maka alokasi Belanja Daerahnya juga tinggi. Selaras dengan pandangan tersebut, Brata (2008) juga menunjukkan harapannya bahwa peningkatan PAD akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan belanja daerah, terkhusus bagi investasi dalam pembelanjaan modal pemerintah daerah, maka mutu layanan publik dapat ditingkatkan. (Isramiwarti, Rasuli, & Taufik, 2017).

Belanja Daerah

Pengeluaran daerah merujuk pada belanja yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah, yang mengakibatkan penurunan saldo anggaran selama periode tahun anggaran tertentu dan tidak dapat dikembalikan oleh pemerintah daerah (didasarkan Perpu Nomor 71 Tahun 2010). (Wirawan Suhaedi, 2019). Pembelanjaan daerah, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, seperti yang dikemukakan dalam penelitian oleh Isramiwarti dkk. (2017), merujuk pada semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum dan mengurangi keseimbangan

dana lancar. Ini menjadi tanggung jawab finansial daerah selama satu tahun anggaran, di mana pembayarannya tidak akan dikembalikan oleh wilayah. Sama dengan ketentuan APBD dan prinsip otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sepenuhnya mencerminkan kerangka perangkat ekonomi yang menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan. (Mardiasmo, 2007).

Anggaran dapat diartikan sebagai alat pengatur kegiatan pengeluaran pemerintah yang merinci sumber pendapatan dan cara pembiayaannya. Meskipun umumnya disusun untuk rentang waktu satu tahun, namun sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, anggaran bisa juga dibuat kedalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Ini mencatatkan prinsip-prinsip dan pedoman untuk penyusunan anggaran di dalam jurnal (Wirawan Suhaedi, 2019). Pembelian dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni: 1. Klasifikasi ekonomi merujuk pada pengategorian belanja berdasarkan jenisnya untuk pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam kerangka klasifikasi ekonomi, belanja dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, ialah pembelanjaan operasional, belanja modal, belanja lainnya yang tidak terduga, dan biaya pengiriman. 2. Kategorisasi berdasarkan organisasi merujuk pada pengelompokan yang didasarkan unit organisasi yang menggunakan anggaran. Pengelompokan pengeluaran menurut organisasi dalam lingkup pemerintah daerah mencakup pengeluaran untuk Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten, dinas pemerintah di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten, serta institusi teknologi di tingkat daerah provinsi/kota/kabupaten. 3. Pengelompokan berdasarkan fungsi merujuk pada pengelompokan berdasarkan peran inti yang diemban oleh pemerintahan pusat atau daerah didalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi ini mencakup sektor-sektor seperti pengeluaran untuk layanan publik, pengeluaran di bidang pertahanan, pengeluaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pengeluaran ekonomi, pengeluaran untuk melindungi lingkungan hidup, pengeluaran di sektor perumahan dan pemukiman, pengeluaran dalam bidang kesehatan, pengeluaran untuk mendukung pariwisata dan budaya, dan juga pengeluaran di sektor agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan ekonomi mampu dihitung melalui Pengeluaran Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Harga Konstan. Tambunan (2006) menjelaskan dimana pertumbuhan berkelanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkontribusi baik kepada kenaikan ekonomi regional. Harianto (2007) memaparkan dimana PAD menjadi Sebagian sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, dan peningkatan PAD akan meningkatkan dana pemerintah daerah, sehingga tingkat kemandirian daerah pun akan bertambah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengeksplorasi potensial lokal, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berkelanjutan PAD juga dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi regional (Tambunan, 2006). Penerimaan dari PAD tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memengaruhi kenaikan tumbuh ekonomi negara. Melalui peningkatan PAD, investasi pemerintah daerah dapat meningkat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan layanan publik.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan jadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Kenaikan PAD tidak hanya akan mencetuskan tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, menghasilkan kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, peningkatan PAD memiliki potensi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kegiatan di

berbagai sektor terkait, termasuk sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor lain yang terkait peningkatan ekonomi (Arini & Kusuma, 2019).

2. *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Menurut Mangkoesoebroto, (1993; 169) dalam penelitian (Taher & Tuasela, 2019) Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk belanja daerah dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Di tahap pertama, ketika ekonomi sedang berkembang, investasi pemerintah menjadi krusial dengan persentase investasi yang signifikan. Ini disebabkan oleh kebutuhan pemerintah untuk memfasilitasi alat dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahap selanjutnya atau menengah, meskipun investasi pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peran investasi swasta menjadi semakin dominan. Sedangkan pada tahap lanjutan, fokus pengeluaran pemerintah bergeser dari pembangunan prasarana menuju program kesejahteraan, misalnya kegiatan lanjut usia dan layanan kesehatan masyarakat. Belanja daerah dalam konteks ini diharapkan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi swasta, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode analisis deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel yang spesifik. Studi bertujuan untuk menguraikan pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Data yang dimanfaatkan dalam studi bersifat time series dan mencakup rentang tahun 2011-2022.

Suatu faktor yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian, disebutkan dengan variabel. Variabel tergantung dan variabel bebas dimanfaatkan dalam studi ini. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel tergantung, sementara pendapatan daerah dan belanja daerah berfungsi sebagai variabel bebas.

Sumber data penelitian berbentuk runtun waktu atau time series. Data sekunder yang dimanfaatkan dalam Penelitian yang mencakup data Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain mendapatkan informasi dari BPS, referensi tambahan diperoleh dari berbagai jurnal dan buku untuk mendukung studi ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji T bermanfaat dalam memperlihatkan dimana keseluruhan variabel bebas digunakan dalam persamaan memiliki pengaruh kepada variabel dependen. Proses ini dilakukan dimana t-hitung dibandingkan dengan t-tabel. Hasil uji ini mengindikasikan sejauh mana setiap variabel penjelas/bebas berpengaruh secara parsial dalam menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa output dari pengujian t adalah seperti berikut ini:

Variabel (X1) Pendapatan Daerah

Berdasarkan nilai probabilitasnya, yakni 0,000 kurang dari 5% atau 0,05, mampu ditarik kesimpulan H_0 tidak disetujui dan H_a disetujui. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah memberikan dampak yang berarti pada kenaikan tumbuh

ekonomi di Tapanuli Selatan. $T\text{-tabel} (\alpha, df = n-k) (5\%, 9) = 1.83311$, $T\text{-hitung} = 1.968759 > 1.78229$

Menghasilkan kesimpulan dimana pendapatan Daerah (X1) mempunyai dampak yang signifikan kepada Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan pada tingkat signifikansi 5%.

Variabel (X2) Belanja Daerah

Jika diperhatikan dari probabilitasnya, yakni 0,0206 yang kurang dari 5% atau 0,05, kesimpulannya adalah bahwa hipotesis nol (H_0) dapat tidak diterima dan hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima. Artinya, dapat mengindikasikan bahwa Belanja Daerah memberikan dampak yang cukup besar pada Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan.

$$T\text{-tabel} (\alpha, df = n-k) (5\%, 9) = 1.83311$$

$$T\text{-hitung} = 3.414039 > 1.78229$$

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang berdampak besar dari Variabel X2, yakni Belanja Daerah, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan pada tingkat signifikansi 5%.

Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi identifikasi keseluruhan variabel independen memberikan pengaruh besar kepada variabel dependen. Bertujuan mencari dampak total variabel independen pada variabel dependen, melalui perbandingan nilai F-hitung dan F-tabel, dan diidentifikasi melalui nilai Prob(F-statistic).

Dengan merujuk pada tabel yang terlampir, dapat disimpulkan bahwa nilai Prob(F-statistic) yaitu 0.0000003, yang dibawah nilai dari 5% atau 0,05. Maka dari itu, kesimpulan

yang dapat diambil adalah penolakan terhadap H_0 dan penerimaan terhadap H_a . Artinya, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan.

$$df1 \text{ rumus nya } (k-1) = (3-1) = 2 \text{ df2 rumus nya } (n-k) = (11-3) = 8$$

$$F_{\text{tabel}} (2,8) = 4,459$$

$$F_{\text{hitung}} = 74.04823 > F_{\text{tabel}} = 4,459$$

Ini berarti bahwa baik Variabel X1 (Pendapatan Daerah) maupun X2 (Belanja Daerah) simultan mempunyai dampak yang cukup besar kepada Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan.

Koefisien Determinasi (Uji R-Squared)

Dari output regresi, digambarkan melalui koefisien determinasi (R-squared) dengan nilai 0,942710, mengindikasikan bahwa sekitar 94,2% variasi pertumbuhan ekonomi mampu digambarkan oleh variabel pendapatan daerah belanja daerah. Sementara itu, 1,5% sisanya diyakini terdapat entitas-entitas lain diluar studi yang dilakukan.

Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan

Menurut hasil uji menggunakan Eviews 9, ditemukan bahwa Pendapatan Daerah terdapat pengaruh signifikan kepada Pertumbuhan Ekonomi Tapanuli Selatan dalam rentang waktu 2011 hingga 2022. Melalui analisis uji t, terungkap bahwa nilai probabilitas

t-hitung pada Variabel Bebas Pengeluaran Pendapatan Daerah mencapai 1.968759, melebihi batas nilai kritis sebesar 1.78229. Selain itu, terdapat koefisien regresi sebesar 0.952526. Ini mengindikasikan bahwa dengan nilai koefisien regresi pendapatan daerah sebesar 0.952526, jika terjadi peningkatan 1% pada pendapatan daerah dengan variabel lainnya tetap konstan. Artinya, pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan daerah, yang digunakan untuk berbagai investasi seperti pembangunan infrastruktur, dukungan sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, peningkatan daya beli masyarakat, serta upaya promosi pariwisata dan investasi. Oleh karena itu, manajemen yang efektif terhadap pendapatan daerah menjadi krusial untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi dan mengelola masalah keuangan yang mungkin muncul.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tapanuli Selatan

Didasarkan hasil uji menggunakan Eviews 9, dapat disimpulkan dimana Belanja Daerah terdapat pengaruh yang cukup besar kepada Pertumbuhan Ekonomi Tapanuli Selatan dalam rentang waktu 2011 hingga 2022. Melalui analisis uji t, terlihat bahwa nilai Probabilitas t-hitung untuk Variabel Bebas Pengeluaran Pendapatan Daerah adalah t-hitung = 3.414039, yang melebihi nilai kritis sebesar 1.78229. Koefisien regresi untuk variabel ini adalah 2184565.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah dan mengindikasikan bahwa, pengeluaran operasional mencakup berbagai aspek, termasuk gaji pegawai, pembelian barang, pembayaran bunga, hibah, bantuan sosial, serta pengeluaran modal seperti pembelian tanah, peralatan mesin, konstruksi gedung dan bangunan, infrastruktur jalan dan irigasi, serta investasi pada aset tetap dan lainnya. Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu memperhitungkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka secara aktif melalui partisipasi dalam proyek- proyek pembangunan yang diakomodasi dalam APBD. Pengeluaran pemerintah memiliki keterkaitan yang erat dengan APBD karena berdampak langsung pada penerimaan dan pembiayaan daerah, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kenaikan tumbuh ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam periode 2011-2022 dianalisis dengan memperhatikan pengaruh belanja daerah. Metode yang digunakan melibatkan analisis Regresi Linier Berganda serta data Time Series dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil dan diskusi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan tertentu yaitu :

- 1) Belanja daerah (X2) mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi (Y) di Tapanuli Selatan.
- 2) Pendapatan daerah dan belanja daerah (X1 dan X2) secara bersamaan berdampak besar pada perkembangan ekonomi di Tapanuli Selatan.

Pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional terlihat dari pendapatan daerah, yang dipergunakan untuk berbagai tujuan seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan sektor pendidikan, dukungan terhadap UMKM, peningkatan daya beli masyarakat, serta promosi pariwisata dan investasi. Efisien dalam mengelola pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam mencegah kendala terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah keuangan. Sementara itu, pengeluaran daerah terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pengeluaran operasional mencakup berbagai aspek seperti gaji pegawai, pembelian barang, pembayaran bunga, pemberian hibah, bantuan sosial, dan berbagai bantuan lainnya. Sementara pengeluaran modal melibatkan investasi pada aset-

aset seperti Lahan, perlengkapan mesin, struktur bangunan, gedung, infrastruktur jalan, irigasi, serta aset tetap dan lainnya. Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga penting untuk memperhatikan keinginan masyarakat dan melibatkan mereka secara aktif melalui partisipasi publik dalam berbagai proyek pembangunan. Hubungan erat antara pengeluaran pemerintah dan APBD sangat signifikan, karena dapat berdampak langsung pada penerimaan dan pembiayaan daerah, serta memberi pengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68–79.
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>
- Anggraini Putri, 2016; Lamaya & Mei, 2021; Putri et al., 2021) Anggraini Putri, S. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Dan Pmdn Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–7.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 S.D 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.
- Koto, jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 193–216. <https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.633>
- Lamaya, F., & Mei, N. N. (2021). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 8(2), 43–49.
- Putri, R. A., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.12858>
- Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(2), 40–58. Retrieved from <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/80>
- Wirawan Suhaedi. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.